

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati selaku Kepala Daerah melalui Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud telah secara optimal melakukan upaya mencegah penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum dan di Desa Mamahan Barat secara khusus melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan serta tindakan penjatuhan sanksi. Upaya preventif terhadap penyalahgunaan dana desa Mamahan Barat berupa pengawasan telah dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud melalui pembinaan dan pengawasan.

B. Saran

1. Pemerintah Desa kiranya melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan bertanggung jawab karena dana desa sangat penting dalam upaya memberdayakan masyarakat dan membangun desa.
2. Para Camat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat kiranya lebih meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan dana desa sebagaimana yang terjadi di Desa Mamahan Barat Kecamatan Gemeh.
3. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kiranya lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan dana desa dan sedapat mungkin dalam setahun minimal dua kali melakukan pengawasan agar tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam mengelola dana desa semakin meningkat dan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, 1987, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*, Alumni, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- , 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Gramedia, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang
- Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Philipus M. Hadjon I), Yuridika, Surabaya
- , et.al., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Philipus M. Hadjon III), Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ridwan H. R, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta
- S. F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Sjahran Basah, 1994, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung

-----, 2001, *Tiga Tulisan Tentang Hukum, yang Dikutip oleh Diana Halim Kuntjoro, Arti, Cara dan Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Optik H.A.N, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Adminsitrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1982, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta

Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, Alumni, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684), sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)
- Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 Nomor 23)
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Mamahan Barat Kecamatan Gemeh Karena Alasan Melanggar Kewajiban dan Larangan Sebagai Kepala Desa dan Mengangkat Sekretaris Desa Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Mamahan Barat Kecamatan Gemeh

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2021

- <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsiindonesia-membaik> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/~Nasional> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://iainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://pemerintah.net/pemerintah-pusat/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pemerintah-adalah/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584a829de499b/icw-lansir-data-korupsi-di-desa/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://pemerintah.net/pemerintah-pusat/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- <https://iainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021